

BAB III

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN UNI EROPA MENGENAI GENDER EQUALITY

Pada Bab III ini akan dibahas mengenai kebijakan pembangunan luar negeri Uni Eropa mengenai gender equality untuk mencapai salah satu tujuan dari MDGs yaitu mempromosikan *gender equality*, bagian selanjutnya akan membahas instrument yang ada di dalam kebijakan pembangunan. Bagian terakhir yang akan dibahas adalah beberapa program yang di buat oleh Uni Eropa dalam mempromosikan gender equality di berbagai negara, seperti di Senegal, Liberia, Nigeria, Republik Demokratik Kongo, dan India.

A. Masalah Pembangunan Yang Dihadapi Negara-Negara Berkembang

Development atau pembangunan sendiri bisa didefinisikan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pada dasarnya dalam negara berkembang yang lepas landas dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi, dimana variable-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik yang membutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam pembangunan. (Siagian, 2005)

The United Nations Development Program's (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia atau *human development* sebagai perluasan kebebasan dan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai dan memiliki alasan untuk dinilai tentang

memperluas pilihan. Kebebasan dan kemampuan adalah gagasan yang lebih luas daripada kebutuhan dasar. Dengan kata lain, orang-orang di negara berkembang berusaha untuk menaiki tangga pembangunan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih memuaskan.

HDI adalah ukuran untuk menilai kemajuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia: kehidupan yang panjang dan sehat, akses ke pengetahuan, dan akses ke standar kehidupan yang layak. Indikator *human development* bisa dilihat pada perkembangan ekonomi seperti pendapatan per kapita di negara tersebut, akses pendidikan dan lama nya bersekolah. Dalam praktek pembangunan, memperhatikan kesenjangan yang ada di antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak-hak, tanggung jawab, akses dan penguasaan terhadap sumber daya alam serta pengambilan keputusan dalam keluarga, di komunitas dan di tingkat nasional adalah sebuah keharusan. Laki-laki dan perempuan sering memiliki perbedaan dalam prioritas, hambatan dan pilihan dengan pembangunan serta dapat mempengaruhi dan dipengaruhi secara berbeda. Perlu mempertimbangkan strategi atau program pembangunan yang efektif bagi perempuan mau pun laki-laki. Pembangunan melibatkan semua masyarakat disuatu negara baik laki-laki maupun perempuan tanpa ketimpangan keterlibatan dari keduanya.

Masalah ketimpangan gender dapat dianggap sebagai aspek universal negara-negara berkembang. Berbeda dengan perempuan di negara-negara maju yang, secara relatif, diberdayakan secara ekonomi dan memiliki suara yang kuat dan tindakan positif. Faktor ekonomi dan budaya, bersama dengan faktor-faktor kelembagaan menyatakan pembagian kerja, hak, tanggung jawab, peluang, dan akses ke dan kontrol atas

sumber daya berbasis gender. Pendidikan, keaksaraan, pekerjaan, kesehatan, pengambilan keputusan, dan lain-lain. (Essays, 2017)

Bidang pertama disparitas antara laki-laki dan perempuan terkait dengan perbedaan status pekerjaan mereka yang dimanifestasikan oleh segregasi pekerjaan, kesenjangan upah berbasis gender, dan perwakilan perempuan yang tidak setara dalam pekerjaan informal, pekerjaan tidak dibayar dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Karena perempuan di negara berkembang memiliki status rendah di masyarakat, kegiatan yang mereka lakukan cenderung kurang dihargai; dan status rendah perempuan juga diabadikan melalui nilai rendah yang ditempatkan pada kegiatan mereka. (UNFPA, 2005)

Perempuan di negara berkembang umumnya diam dan suara mereka telah tertahan oleh faktor ekonomi dan budaya. Disparitas antara laki-laki dan perempuan terkait dengan perbedaan status pekerjaan mereka yang dimanifestasikan oleh segregasi pekerjaan, kesenjangan upah berbasis gender, dan representasi perempuan yang tidak setara dalam pekerjaan informal, pekerjaan tidak dibayar dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Perempuan di negara berkembang memiliki status rendah di masyarakat, kegiatan yang mereka lakukan cenderung kurang dihargai; dan status rendah perempuan juga diabadikan melalui nilai rendah yang ditempatkan pada aktivitas mereka. (Essays, 2017)

Kedua, akses perempuan yang terbatas pada pendidikan, kesempatan kerja, dan media, yang terkait dengan faktor budaya, mengurangi kekuatan pengambilan keputusan mereka di masyarakat pada umumnya dan di rumah tangga pada khususnya. Mengenai partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, meskipun jumlah perempuan di parlemen nasional rata-rata telah meningkat, tidak ada negara di dunia yang mencapai paritas gender.

Kesenjangan gender dalam pendidikan dasar hanya merupakan salah satu indikator ketimpangan yang lebih luas antara pria dan wanita dan kurangnya pemberdayaan perempuan di negara berkembang. Meskipun saat ini perempuan menjadi bagian yang meningkat dari angkatan kerja dunia - lebih dari sepertiga di semua wilayah, kecuali Asia Selatan dan Barat dan Afrika Utara, mereka tetap dirugikan mengamankan pekerjaan berbayar dan hak sosial dan hukum yang setara di banyak masyarakat.

Ketiga, banyak wanita menjalani hidup mereka karena tidak bisa menghindari kematian secara sosial sebagai akibat dari bias gender dalam distribusi perawatan kesehatan dan kebutuhan lainnya. Perempuan meninggal karena peran reproduksinya yang tidak dapat dihindari ditambah dengan alokasi sumber daya kesehatan yang bias gender. Meskipun jumlah kematian ibu telah menurun secara global, sub-Sahara Afrika telah menunjukkan sedikit atau tidak ada kemajuan. Sekitar 358.000 wanita meninggal setiap tahun secara global di negara-negara berkembang sebagai akibat dari kehamilan. Masalah kematian ibu adalah kondisi khusus perempuan. Perbedaan harapan hidup antara perempuan dan laki-laki di seluruh negara merupakan cerminan perbedaan dalam ketidaksetaraan gender lintas negara dan waktu. (NCBI, 2013)

Keempat, keterwakilan perempuan untuk ikut andil dalam membuat keputusan atau keterwakilan perempuan di kursi parlemen masih rendah. Kurangnya representasi perempuan di kantor terpilih merupakan tantangan bagi demokratisasi di seluruh dunia. Parlemen, khususnya, dirancang untuk mewakili semua sektor masyarakat, tetapi sebagian besar parlemen dunia didominasi oleh laki-laki.

Menurut indikator milenium basis data PBB, dikutip dalam UNFPA, persentase kursi parlemen yang dipegang oleh perempuan pada tahun 2005 adalah 16%

di tingkat dunia, 21% di negara-negara maju, dan 14% di negara-negara berkembang. Representasi perempuan yang rendah ini di parlemen nasional dapat karena jenis sistem pemilu di negara yang berbeda, status sosial dan ekonomi perempuan, tradisi dan keyakinan sosio-kultural tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta beban ganda perempuan atas pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. (UNFPA, 2005)

Sementara partisipasi wanita dalam politik, dan dengan demikian potensial untuk merangsang perubahan sistemik, telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir, masih ada perbedaan mencolok antar wilayah. Sementara di Amerika Latin dan Karibia, di mana wanita sekarang memegang 20 persen kursi parlemen, representasi politik nasional perempuan tetap sangat rendah di Afrika Utara dan Asia Barat. Kesehatan yang buruk, kurangnya kesempatan untuk menerima pendidikan dasar yang berkualitas dan ketidaksetaraan semua tanda-tanda kemiskinan menimpa banyak orang dalam pembangunan negara-negara, dengan angka tertinggi di sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Di sebagian besar negara berkembang sebagian besar penduduknya tergantung pada bayaran rendah dan tidak terlindungi dengan baik pekerjaan di ekonomi informal. Sekitar setengah dari pekerja dunia, sebagian besar mereka wanita, memiliki sedikit atau tidak ada perlindungan sosial dan tidak mampu menghasilkan cukup untuk mengangkat diri mereka sendiri keluar dari kemiskinan. (Commission, Investing in people, 2013)

B. Kebijakan Gender Uni Eropa Dalam Mencapai Pembangunan

Gender equality dan pemberdayaan perempuan adalah hak asasi manusia dan pendorong pembangunan. Meningkatkan partisipasi perempuan di semua lapisan

masyarakat dapat memiliki dampak positif yang signifikan seperti, memfasilitasi rekonstruksi, dan membantu membangun masyarakat yang damai, juga menyediakan cara untuk mengubah aturan dan norma-norma sosial yang membatasi anak perempuan dan anak laki-laki, perempuan dan laki-laki, dari memenuhi potensi mereka.

Komitmen gender kebijakan pembangunan Uni Eropa lebih lanjut dijabarkan dalam *the EU Plan of Action on Gender Equality and Women's Empowerment* (2010-2015), yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi Uni Eropa mengenai kebijakan kesetaraan gender dalam kerja sama pembangunan dan meningkatkan kerja dalam hal *gender equality*. *Gender Action Plan* ini juga bertujuan untuk bekerja lebih jauh menuju pencapaian MDGs, khususnya *gender equality*. Rencana Aksi ini memberikan panduan operasi dan berisi serangkaian kegiatan tentang berbagai isu mulai dari memasukkan gender dalam dialog politik dan kebijakan, meningkatkan pengarusutamaan, ke pembangunan kapasitas internal, dan pelacakan bantuan yang lebih baik yang ditujukan untuk memastikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dalam mencapai MDGs yang ketiga yaitu mempromosikan *gender equality*, Uni Eropa didukung oleh beberapa organisasi internasional seperti PBB, WHO, IMF atau Bank Dunia.

Dalam melawan kemiskinan, hubungan antara gender dan kemiskinan menjadikan promosi *gender equality* dalam kerja sama pembangunan merupakan prasyarat keberhasilannya. Uni Eropa memiliki komitmen jangka panjang untuk mempromosikan kesetaraan gender dan telah memainkan peran aktif di panggung internasional dengan mengadvokasi hak-hak perempuan, terutama pada *the 1995 Fourth World Conference on Women in Beijing*, di mana Uni Eropa adalah partai yang aktif dalam menyusun Platform Aksi.

Sejak itu, konsep *gender mainstreaming* telah menjadi strategi dan alat penting untuk mencapai tujuan gender equality. (Commisson, 2018)

Program Uni Eropa mendukung partisipasi politik perempuan, serta peningkatan status ekonomi dan sosial mereka. Hal ini dilakukan, misalnya, melalui memfasilitasi kontribusi perempuan dalam proses pembangunan perdamaian dan negara, dan mempromosikan hak milik yang setara untuk laki-laki dan perempuan. Gender terintegrasi ke dalam program sektor mulai dari kesehatan dan pendidikan hingga pengembangan sektor swasta, keamanan pangan dan infrastruktur. Beberapa negara berkembang pesat sementara yang lain, terutama di sub-Sahara Afrika dan Asia selatan, tertinggal di belakang. Uni Eropa berkomitmen untuk menutup kesenjangan gender ini. Sejak 2004 kontribusi Uni Eropa telah membantu 300.000 siswa perempuan baru untuk mendaftar di pendidikan menengah. Selain itu, lebih dari 18.000 siswa pendidikan tinggi perempuan telah mengambil bagian dalam skema mobilitas (Commission, Gender Equality in Development Co-operation, 2003).

Pada tahun 2000, Komisi Eropa memulai reformasi besar dalam program bantuan eksternalnya, yang mencakup pendekatan yang lebih strategis dan efisien, pengaturan kembali kantor pusatnya, pendekatan yang mapan, reorganisasi markas besarnya, pembentukan *Eropa-Aid*, dan dekonsentrasi kewenangan manajemen ke lapangan. Selain itu, pernyataan bersama oleh Komisi Eropa dan Dewan Menteri pada bulan November 2000 menjadikan pengurangan kemiskinan sebagai tujuan utama kebijakan pembangunan Uni Eropa (Holland 2002; Dearden 2003) (Carbone, 2006)

The EU Consensus on Development 2005 meyakini kesetaraan gender adalah salah satu prinsip kerjasama pembangunan. Bersama-sama diadopsi oleh

Dewan dan Parlemen untuk mewakili visi bersama pembangunan di mana gender diakui sebagai tujuan yang penting dan tidak semata-mata sebagai sarana untuk mencapai pengentasan kemiskinan. Uni Eropa akan memasukkan komponen gender yang kuat di semua kebijakan dan praktiknya dalam hubungan dengan negara-negara berkembang. (Dion, n.d) Pada 2007, Komisi Eropa dan Dewan Eropa mengadopsi *Communication on Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) in Development Cooperation* untuk mendetailkan usaha *gender equality* agar dapat mengarahkan negara donor (partner nya), seperti dalam target MDGs 2015. Kerjasama pembangunan di tingkat Uni Eropa diatur oleh *European Consensus on Development* (ECD).

Gender adalah unsur yang sangat penting bagi pembangunan. Dalam praktik pembangunan, memperhatikan kesenjangan yang ada di antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak-hak, tanggung jawab, akses dan penguasaan terhadap sumber daya alam serta pengambilan keputusan dalam keluarga, di komunitas dan di tingkat nasional adalah sebuah keharusan. Laki-laki dan perempuan sering memiliki perbedaan dalam prioritas, hambatan dan pilihan dengan pembangunan serta dapat mempengaruhi dan dipengaruhi secara berbeda. Perlu mempertimbangkan strategi atau program pembangunan yang efektif bagi perempuan maupun laki-laki. Pembangunan melibatkan semua masyarakat di suatu negara baik laki-laki dan perempuan tanpa ketimpangan keterlibatan dari keduanya.

Kebijakan pembangunan merupakan wilayah dimana Uni Eropa dapat mengklaim sebagai pemimpin internasional dengan pengaruh signifikan yang membentuk agenda global. Sementara hubungan formal Uni Eropa dengan negara berkembang sama tuanya dengan proses integrasi itu sendiri, bentuk dan isi

hubungan tersebut telah berubah secara signifikan sejak penandatanganan Perjanjian Roma pada tahun 1957. (Holland & Doidge, 2012) Berdasarkan Konsensus Eropa pada prinsip Pembangunan bahwa kesetaraan gender adalah hak asasi manusia fundamental dan prakondisi untuk pembangunan berkelanjutan. Dasar hukum untuk kebijakan bantuan eksternal Komisi Eropa tentang kesetaraan gender terletak pada Regulasi 1998 "*on the integration of gender issues in development cooperation*". Kewajiban ini menginformasikan perkembangan dokumen kebijakan yang mbingkai kerja sama pembangunan dan memastikan bahwa kerjasama pembangunan Uni Eropa dan Negara-negara Anggota mendukung pemberdayaan perempuan.

Diadopsi pada Juni 2010 sebagai bagian dari Konsili Dewan untuk mencapai MDG, *The Action Plan Uni Eropa* bertujuan untuk menjadi panduan paralel untuk pelaksanaan Komunikasi 2007 tentang *Gender Equality and Women's Empowerment*. *The Action Plan* memiliki pendekatan yang terkoordinasi untuk mewujudkan komitmen gender equality dan meningkatkan dampak di lapangan. Berfokus pada (1) dialog politik dan kebijakan dengan negara-negara mitra; (2) gender mainstreaming di semua program dan (3) tindakan khusus yang membutuhkan dukungan yang ditargetkan, rencana tersebut menetapkan langkah-langkah konkret untuk dilakukan bersama oleh Negara-negara Anggota dan Komisi dan mengharuskan pelaporan tahunan terhadap target yang ditetapkan. (Dion, n.d)

Menyediakan 60% dari bantuan luar negeri di dunia yang disalurkan melalui Komisi Eropa berjumlah 53,8 miliar euro, Uni Eropa juga merupakan mitra dagang utama dari banyak negara berkembang. Dengan demikian posisi yang baik untuk mendukung negara-negara Selatan yang telah terkena dampak terbesar oleh krisis keuangan, lingkungan, bahan bakar dan makanan.

Namun, untuk memiliki dampak jangka panjang, Uni Eropa harus mempertahankan komitmennya untuk memberantas kemiskinan dan yang paling penting memenuhi komitmennya untuk perempuan dan anak perempuan. (Dion, n.d)

Eropa adalah donor bantuan terbesar. Di ibukota Eropa, bantuan pembangunan lebih dianggap sebagai instrumen kebijakan luar negeri, untuk mempromosikan kepentingan ekonomi nasional, komersial atau kepentingan strategis dan merupakan tujuan sah bagi pemerintah nasional, tetapi kesejahteraan manusia tidak boleh diabaikan. Dalam *European Consensus on Development*, Uni Eropa secara eksplisit mengartikulasikan *gender equality* sebagai salah satu prinsip penting dari kerja sama pembangunan. Mengingat semakin pentingnya *gender equality* di seluruh spektrum luas domain kebijakan Uni Eropa, termasuk tindakan eksternal. (Debusscher, 2013)

Development Cooperation Instrument adalah instrument yang ada di *European Consensus Development* yang mempunyai tujuan untuk pengurangan kemiskinan. DCI juga berkontribusi pada pencapaian tujuan lain dari tindakan eksternal Uni Eropa, khususnya mendorong pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan serta mempromosikan demokrasi, supremasi hukum, tata pemerintahan yang baik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Di dalam *Development Cooperation Instrument* ada tiga komponen khusus yang tercakup: *Geographic programmes*, *Thematic Programmes*, dan yang terbaru *Pan-African Programmes*. *Geographic programme* mendukung kerjasama dengan sekitar 47 negara berkembang seperti *the 2000 MEDA regulation*, *1992 ALA regulation* dan *the 2000 Cotonou ACP-EU Partnership Agreement* pada bidang-bidang seperti hak asasi manusia, demokrasi, pemerintahan yang bagus

(peraturan hukum, gender equality, memerangi korupsi, manajemen sektor publik), keamanan, dan lain-lain. *Thematic programmes* menguntungkan semua negara berkembang dengan membahas pembangunan manusia, perubahan iklim, lingkungan, energi, ketahanan pangan dan migrasi sambil memastikan koherensi dengan tujuan pengurangan kemiskinan. Setidaknya 25% dari program ini digunakan untuk mendukung inklusi sosial dan pengembangan manusia. (Commission, DCI, 2018)

Pan-African Programme yang baru dibentuk untuk mendukung kemitraan strategis antara Uni Eropa dan Afrika. Program ini melengkapi instrumen yang lain di Afrika (khususnya ENF dan EDF) dan mendukung kegiatan alam trans-regional, benua atau global di dan dengan Afrika. Kerjasama pembangunan Uni Eropa dengan negara-negara sub-Sahara Afrika, Karibia dan Pasifik di realisasikan dengan adanya Perjanjian Cotonou yang ditandatangani pada tahun 2000. Perjanjian Cotonou menyajikan komitmen yang disepakati dengan jelas untuk *gender equality* dan pemberdayaan perempuan, termasuk kesehatan dan hak seksual dan reproduksi serta memerangi kekerasan berbasis gender. (Hansson, n.d) Sejak tahun 2000, Perjanjian Cotonou sudah menjadi kerangka untuk kerjasama Uni Eropa dengan 79 negara dari Afrika, Karibia, dan Pasifik atau ACP countries. Di tahun 2010, kerjasama Uni Eropa dengan negara ACP sudah diadaptasi ke dalam tantangan-tantangan baru dan *gender equality* termasuk ke dalam salah satu tantangan.

Thematic programmes di bawah DCI melengkapi program geografis. Program-programnya mencakup spesifik area aktivitas yang diminati oleh sekelompok negara mitra yang tidak ditentukan oleh geografi, atau kegiatan kerja sama yang berfokus pada berbagai wilayah atau kelompok negara mitra, atau operasi internasional yang tidak spesifik secara geografis.

Tindakan tidak hanya mencakup negara-negara yang memenuhi syarat untuk kerjasama geografis di bawah DCI tetapi juga negara-negara dan wilayah yang memenuhi syarat di bawah *European Development Fund* (EDF) dan negara-negara *European Neighborhood and Partnership*. Periode pemrograman mencakup sebagian besar kasus 2011-2013. Jumlah dana yang dikeluarkan oleh Uni Eropa untuk program periode 2011-2013 adalah 130 juta euro per tahun. Dan 67 juta atau sekitar 6% untuk *gender equality*. (Commision, Investing In People, 2012)

Dalam bantuan pembangunan Uni Eropa, gender secara sistematis disebut sebagai masalah lintas sektor. Masalah juga merupakan masalah dalam program '*Investing in People*'. Untuk melengkapi dan menambah nilai *gender equality* di tingkat negara dan sektor, prioritas program berikut telah diidentifikasi untuk 2011- 2013, yang pertama promosi dan perlindungan hak-hak perempuan, dan penguatan pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan di tingkat nasional dan lokal, yang kedua adalah dukungan untuk pengembangan dan pengujian pendekatan inovatif untuk mengarusutamakan *gender equality* dan pemberdayaan perempuan dalam pengembangan kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Total anggaran untuk periode 2011-2013 untuk program '*Investing in People*' sekitar EUR 130 juta per tahun 67 juta (6%) untuk *gender equality*. (Commision, Investing In People, 2012)

Pilar *gender equality*, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dan perbaikan keaksaraan di kalangan wanita dewasa. Pilar ini akan fokus khususnya untuk memastikan bahwa para pendukung *gender equality* memiliki suara merumuskan program pengembangan dan secara progresif termasuk dalam proses penyusunan anggaran dan keputusan, berdasarkan kepemilikan untuk semua - salah satu

prinsip inti dari yang baru prosedur bantuan. (Commission, Investing in people, 2013) Pendanaan akan disalurkan melalui mekanisme yang paling sesuai untuk masing-masing bidang.

Komisi Eropa telah berpartisipasi dalam upaya pemecahan masalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana prosedur bantuan baru yang menjadi ujung tombak akan efektif bagi perempuan dan untuk mempromosikan kesetaraan jender. Penganggaran *gender equality*, yang telah dipromosikan secara aktif oleh Komunitas Eropa dalam beberapa tahun terakhir, merupakan alat penting dalam hal ini. Konferensi Ghana OECD 2008 untuk merevisi Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan akan menyediakan sebuah forum kritis di mana keberhasilan dukungan anggaran akan dinilai. (Commission, Investing in people, 2013)

Di tingkat global, program harus mendukung kegiatan yang merangsang komitmen politik untuk mempromosikan kesetaraan gender dan kebijakan, inisiatif legislatif dan pendanaan menciptakan peluang yang adil dan setara untuk laki-laki dan perempuan. Pendekatan global harus diperkuat dengan tindakan di tingkat negara yang akan meningkatkan kapasitas perwakilan masyarakat sipil - terutama LSM dan asosiasi perempuan - untuk memajukan agenda kesetaraan jender melalui pemantauan, advokasi dan partisipasi dalam kebijakan negara dialog.

Kebijakan eksternal Uni Eropa dan komitmen internasional dan akan fokus pada penyediaan sinergi antara tema dan kebijakan Uni Eropa di bidang-bidang ini untuk memperkuat koherensi. *Investing in people* membangun dan memadukan akuisisi yang diformulasikan dalam serangkaian kebijakan utama documents. Ini melengkapi strategi negara. Melalui program tematis ini, Uni Eropa dan negara mitra bermaksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan praktik adat yang didasarkan pada gagasan rendah diri

atau superioritas salah satu dari jenis kelamin atau pada peran stereotip untuk pria dan wanita.

Pada tahun 2011, Komisi mengadopsi dua Komunikasi. Satu tentang kebijakan pembangunan Uni Eropa, *'The agenda for change'* dan yang lainnya tentang dukungan anggaran, *'The future approach to EU budget support to third countries'*. (Commission, Introduction to the thematic instruments and programmes 2011-2013, 2012) *The Agenda for Change* diluncurkan pada tahun 2011, telah menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan Uni Eropa dalam beberapa waktu tahun terakhir, mewakili pendekatan baru untuk menanggapi tantangan global yang kompleks, mengurangi kemiskinan dan mendukung negara-negara berkembang untuk mencapai *Millennium Development Goals*. Sejalan dengan *The Agenda for Change*, Uni Eropa telah mengarahkan sumber daya ke tempat yang paling dibutuhkan, agar pendanaan Uni Eropa untuk pembangunan lebih efektif. Pemfokusan ulang sumber daya terhadap negara-negara dengan kebutuhan terbesar dan di mana dukungan dapat memiliki dampak paling besar dalam mengurangi kemiskinan telah memungkinkan Uni Eropa meningkatkan porsi bantuan yang dialokasikan langsung kepada *Least Developed Countries* dan negara-negara berpenghasilan rendah lainnya menjadi sekitar 75%.

Uni Eropa juga telah berinvestasi lebih banyak untuk membantu orang berpartisipasi dan mendapat manfaat dari kekayaan dan penciptaan lapangan kerja. Untuk tujuan ini, setidaknya 20% dari bantuan Uni Eropa mendukung inklusi sosial dan pembangunan manusia, menangani pendidikan, kesehatan, gender dan dukungan terhadap sistem perlindungan sosial melalui kebijakan luar negeri yang diadopsi. Uni Eropa juga memastikan bahwa negara anggota ikut membantu proses implemmentasi kebijakan.

Tahun 2015 merupakan titik balik yang penting untuk pembangunan berkelanjutan dan *gender equality*. Menandai adopsi Agenda 2030, peringatan 20 tahun adopsi Deklarasi dan Platform Beijing untuk Aksi dan ulang tahun ke 15 Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Uni Eropa menyambut Agenda Aksi Addis Ababa dan Agenda 2030 untuk Berkelanjutan Pembangunan yang menegaskan kembali peran penting *gender equality* dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan untuk realisasi penuh hak asasi manusia mereka. Hak-hak perempuan dan anak perempuan adalah inti dari Pembangunan Berkelanjutan Tujuan, baik sebagai tujuan yang berdiri sendiri dan masalah lintas sektoral.

C. Integrasi Gender Equality Uni Eropa Di Beberapa Negara

Uni Eropa melakukan integrasi gender equality karena implementasi gender equality masih belum maksimal di beberapa negara. Dilihat dari data *Human Development Index*, beberapa negara tingkat ketidaksetaraan gendernya masih tinggi seperti Senegal, Kepulauan Solomon, Sierra Leone, Liberia, Nigeria. Dilihat dari pendapatan perkapita, indeks ketidaksetaraan gender, angkat kematian ibu, tingkat kelahiran remaja, korsi perempuan dalam pemerintahan, populasi dengan pendidikan menengah, tingkat partisipasi kerja antara perempuan dan laki-laki. Lima negara tersebut memiliki angka yang bisa dibilang masih rendah dalam implementasi *gender equality*.

Tabel 3.1 Human Development Index
 Source: *Human Development Reports 2015*
 (<http://hdr.undp.org>) dan World Bank Data 2016
 (data.worldbank.org)

Country	Income per capita 2016 (\$)	Gender Inequality Index		Maternal mortality ratio (deaths per 100,000 live births)	Adolescent birth rate (% held by women)	Share of seats in parliament (% ages 25 or older)	Population with secondary education (% ages 15 and older)		Labour force participation rate	
		Value	Rank				F	M	F	M
Senegal	952.8	0.521	120	315	78.6	42.7	10.2	19.2	45.0	70.2
Solomon	2,005.5	-	-	114	48.4	2.0	-	-	61.1	73.5
Sierra Leone	505.2	0.650	151	1,360	118.8	12.4	16.8	29.7	65.0	68.6
Liberia	455.4	0.649	150	725	108.8	10.7	17.3	39.7	58.0	63.9
Nigeria	2,175.7	-	-	814	110.6	5.8	-	-	48.4	64.0

1. Senegal

Di Senegal yang di bawah kedok tradisi, adat istiadat atau kemiskinan, anak perempuan dan perempuan memiliki hak-hak dasar mereka dilanggar, diserang, dilecehkan dan hidup dalam kondisi yang tidak layak. Laporan Komisi 2012 tentang Implementasi Rencana Aksi Uni Eropa tentang Gender Kesetaraan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan, Uni Eropa memiliki satu proyek yang berjalan di Senegal yang memiliki kesetaraan gender sebagai tujuan. Ketika datang ke pendanaan, menurut Program Indikatif Nasional (NIP) 2014-2017 untuk Senegal, 6 juta euro, disediakan oleh Italia, dipertimbangkan untuk isu-isu gender.

Untuk meringkas studi kasus ini, tindakan Uni Eropa di Senegal tampaknya tidak mencapai standar yang ditetapkan oleh Perjanjian Cotonou. *Gender equality* telah menjadi bagian dari dialog politik di Senegal, tetapi diketahui seberapa luas dialog-dialog ini. Namun, dialog tampaknya menjadi sarana utama Uni Eropa untuk menerapkannya komitmen terhadap hak-hak dan kesetaraan gender perempuan. Sebaliknya, *gender mainstreaming* dan proyek-proyek khusus tampaknya tidak memainkan peran besar pada pendekatan gender di Senegal. (UNHR, 2015)

Pada 2010, undang-undang paritas gender Senegal mulai berlaku, yang mengharuskan partai politik untuk memastikan bahwa setidaknya separuh kandidat mereka dalam pemilihan lokal dan nasional adalah perempuan. Undang-undang dipandang oleh banyak orang sebagai langkah yang diperlukan untuk memaksa perubahan di negara dengan dinamika gender yang kompleks, dipengaruhi oleh kebiasaan dan kepercayaan tradisional, Islam dan kolonialisme Prancis. Lebih dari separuh dari 12,5 juta penduduk Senegal adalah perempuan dan meskipun perempuan telah lama terorganisir di tingkat lokal, membentuk

koperasi dan asosiasi untuk meningkatkan akses ke layanan publik, ini belum ditafsirkan dengan mudah ke dalam kekuasaan di tingkat parlemen.

Kemajuan signifikan telah dicapai di Senegal, baik dalam kerangka hukum dan kelembagaan atau banyak kebijakan dan kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan. Namun, batasan sosial-budaya dan hukum yang kuat terus menghalangi pencapaian kesetaraan gender. Peningkatan menunjukkan bahwa, meskipun tidak ada hambatan formal untuk partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan ekonomi negara, dalam praktiknya, ada banyak rintangan.

Lebih dari 80% perempuan aktif bekerja di sektor informal, tidak mendapatkan manfaat dari layanan sosial dasar dan sering bekerja dengan jam kerja yang panjang di bawah standar dan bahkan kondisi berbahaya. Akses yang sangat terbatas terhadap lahan untuk wanita dan ini meskipun pemerintah menyediakan sebagian besar produksi pertanian. Melegakan mengetahui bahwa Senegal telah mencapai kesetaraan gender dalam akses ke pendidikan dasar dan tingkat partisipasi kasar untuk anak perempuan sebesar 98%. Namun, angka putus tetap jauh lebih tinggi di antara anak perempuan. Pekerjaan rumah tangga, pelecehan seksual di sekolah, pernikahan dini dan kehamilan dini adalah faktor kegagalan sekolah. (UNHR, 2015)

Di Senegal, kebijakan gender paritas menimbulkan kritik dari pengacara terkenal bernama Diouf, yang berkata bahwa undang-undang ini adalah ketidakadilan dan juga kecurangan politik. Gender paritaas menurutnya akan memperlambat pembangunan dan seharusnya mengatakan kepada perempuan bahwa mereka tidak akan diberikan rute yang mudah ke dalam politik sebagai hadiah. Pendapat ini dikhawatirkan akan menimbulkan pihak lain terpengaruh dan akan merusak kebijakan yang dibuat.

Senegal menduduki peringkat 155 dari 187 dalam Indeks Pembangunan Manusia UNDP 2011 dan tidak hanya menghadapi pengangguran kaum muda yang besar, dengan 44% populasinya saat ini di bawah 15 tahun, tetapi juga menyusutnya pertanian, menurunnya stok ikan, ketidakamanan pangan yang persisten dan tantangan infrastruktur jangka panjang. Tetapi beberapa orang di Senegal percaya bahwa perempuan ditempatkan secara unik untuk menghadapi kebutuhan negara. Pejabat politik membukasuara bahwa "*Anggota parlemen perempuan lebih baik untuk memohon lebih banyak kebijakan sosio-ekonomi manusia di Senegal*". Perempuan adalah orang-orang yang berurusan, setiap hari, realitas kondisi kehidupan yang keras bagi lebih dari 70% dari populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Wanita yang berbaris selama berjam-jam di bawah matahari untuk menemukan gas, air, dan roti berharga ketika negara gagal melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjamin layanan publik yang tepat dan akses yang sama terhadap sumber daya. (Hirsch, 2012)

2. Kepulauan Solomon

Ketidaksetaraan gender adalah hal yang lazim di Kepulauan Solomon, dan dampak kesehatan melalui pola makan diskriminatif, kekerasan terhadap perempuan, kurangnya kekuatan pengambilan keputusan, dan pembagian kerja yang tidak adil, serta selain membatasi akses ke layanan perawatan kesehatan. Salah satu konsekuensi paling signifikan dari ketidaksetaraan gender bagi perempuan di Kepulauan Solomon adalah tingkat kekerasan berbasis gender (GBV) yang mereka hadapi, yang berkisar dari kekerasan seksual, paksaan, kekerasan emosional dan fisik yang dilakukan oleh orang yang akrab dan bukan pasangan.

Di Kepulauan Solomon kekerasan berbasis gender dianggap normal, 73% pria dan 73% wanita percaya kekerasan terhadap perempuan dapat dibenarkan, terutama untuk perselingkuhan dan ketidakpatuhan. laki-laki mengaku bahwa mereka melakukan kekerasan sebagai bentuk disiplin. Norma gender maskulinitas cenderung mendorong laki-laki untuk mengendalikan istri mereka, sering melalui kekerasan, sementara perempuan merasa bahwa harga pengantin mencegah mereka meninggalkan laki-laki. Perempuan secara rutin dikeluarkan dari partisipasi dalam ekonomi formal dan kepercayaan tradisional tentang peran perempuan. Ketika mereka adalah bagian dari angkatan kerja, perempuan yang bekerja dibayar rendah, dianggap tidak terampil, sebagian besar karena tingkat pendidikan dan melek huruf yang lebih rendah dan akses yang buruk ke pelatihan keterampilan. (UNWomen, n.d)

Uni Eropa dan Kepulauan Solomon dapat melihat kembali kerjasama selama 34 tahun dalam konteks kemitraan EU-ACP. Kemitraan ini didasarkan pada warisan sejarah bersama, nilai-nilai bersama, hubungan ekonomi dan perdagangan. Kemitraan antara Uni Eropa dan Kepulauan Solomon telah memungkinkan kedua belah pihak untuk bekerja bersama-sama mengatasi tantangan seperti masalah tata kelola, perubahan iklim, isu-isu gender, pembangunan pedesaan, infrastruktur, air, sanitasi dan kebersihan dasar. Perjanjian Kemitraan Cotonou menyediakan kerangka kerja untuk tujuan pembangunan bersama termasuk masalah gender. (Rasanathan, 2011)

Di Kepulauan Solomon, Uni Eropa mendukung pengembangan serial drama radio yang menceritakan kisah fiksi tentang seorang wanita yang mencalonkan diri untuk pemilihan untuk mendorong lebih banyak perempuan untuk berdiri dan mencari posisi kepemimpinan. Partisipasi politik oleh perempuan di

Kepulauan Solomon sangat rendah. Hanya satu dari 50 anggota parlemen adalah seorang wanita. Uni Eropa mendukung partisipasi politik perempuan melalui proyek 'Strongim Mere', yang bertujuan untuk mendorong *Pacific Islanders* untuk terlibat dalam politik dan untuk mendorong lebih banyak 10 bagian perempuan untuk mengambil posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Proyek ini telah menghasilkan serangkaian drama radio, *A Time to Stand*, yang menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh perempuan di Kepulauan Solomon ketika mereka mencoba untuk berpartisipasi dalam politik, dan bagaimana mengatasinya. Drama ini membantu menyebarkan pesan ke semua provinsi, daerah pemilihan dan desa-desa Kepulauan Solomon, terutama ke daerah pedesaan yang paling dibutuhkan. *A Time To Stand* telah mencapai sekitar 430000 orang dan lebih dari 5000 desa pedesaan. (Commission, The EU's Contribution to the Millenium Development Goals, 2015)

3. Sierra Leone

Salah satu dari banyak proyek pembangunan Uni Eropa di berbagai negara adalah proyek yang ada di Guatemala, Sierra Leone, India. Aktivitas proyeknya di mulai pada tanggal 2 November 2010. Proyek atau program ini di buat untuk meningkatkan akses perempuan yang miskin dan dikesualikan dan mengontrol tanah sebagai strategi untuk pemberdayaan dan kelaparan. Di Guatemala, para petani wanita pribumi menderita dari perampasan tanah berabad-abad. Tradisi membuat kepemilikan tanah dan sarana produksi sulit. Di Sierra Leone, orang miskin yang tinggal di daerah pedesaan terpencil juga mengalami pengucilan yang serupa, dengan perempuan pedesaan, khususnya, mereka yang janda atau dipengaruhi oleh perang dan baru-baru ini mereka yang terkena dampak HIV &

AIDS menderita diskriminasi tiga kali lipat dan kurangnya hak atas properti yang berarti.

Proyek ini telah memilih 3 negara target karena semuanya mewakili aspek yang berbeda dari masalah yang sama dan membawa kelompok dan gerakan perempuan bersama-sama untuk masing-masing menawarkan pengalaman lintas-pembelajaran yang hebat dan kesempatan untuk membangun hubungan antar daerah. Proyek ini bertujuan untuk pemberdayaan, peningkatan standar hidup dan martabat perempuan yang miskin dan tidak diikutsertakan. Kemampuan untuk membela hak-haknya memungkinkan perempuan untuk memiliki standar hidup dan martabat yang lebih baik melalui kehidupan ekonomi yang lebih baik, peningkatan status, kemampuan untuk menegosiasikan hubungan dan meningkatkan keamanan pribadi termasuk perlindungan dari kekerasan dan HIV/AIDS. Kemandirian ekonomi, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan umum akan ditingkatkan.

Hasil yang diperkirakan dari proyek Uni Eropa dengan partner kerjasamanya yaitu *ActionAid*, peningkatan kapasitas kelompok perempuan untuk mengembangkan dan memimpin advokasi hak atas tanah; peningkatan partisipasi gerakan perempuan tanpa lahan dalam pengembangan kebijakan dan kerangka hukum di tingkat lokal dan nasional; peningkatan kesadaran akan hak dan penggunaan sistem peradilan; penciptaan aliansi gerakan dan kelompok antar daerah; peningkatan pengetahuan dan bukti empiris tentang keterkaitan antara akses atau kontrol lahan dan pemberdayaan perempuan, disebarluaskan di tingkat regional dan internasional termasuk program yang menjanjikan dan pendekatan pendampingan. Komisi telah memberikan EUR 1.000.000 untuk proyek tersebut. 84,82% dari total biaya proyek (EUR 1,178.933) selama periode 36 bulan dari 2 November

2010. (Commission, Gender Equality in Development Co-operation, 2003)

4. Liberia

Di Liberia, pria dan wanita memiliki divisi gender yang jelas tentang pekerjaan. Wanita biasanya membersihkan, memasak, dan merawat anak-anak, tetapi kontribusi mereka kepada keluarga jarang diakui sebagai pekerjaan. Laki-laki dilihat sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Perempuan menjadi korban bias gender di masyarakat dalam pendidikan, perawatan kesehatan, kepemilikan tanah, dan kredit, bersama dengan praktik budaya seperti perkawinan yang diatur sebelumnya dan mutilasi genital perempuan. Faktor-faktor ini membatasi perempuan memasuki angkatan kerja.

Mutilasi genital perempuan lazim di beberapa kelompok etnis di seluruh Liberia. Perang sipil menyebabkan penurunan mutilasi genital perempuan karena pergolakan hidup di daerah pedesaan, tetapi praktik ini masih umum. (OECD, 2010) Sebuah studi 2007 menunjukkan bahwa 52,8% wanita usia 15-29 tahun di Masyarakat Sande telah mengalami mutilasi genital perempuan. Mayoritas korban tidak berbicara menentang praktik karena takut dikucilkan atau dibunuh oleh anggota masyarakat. Kematian ibu adalah masalah besar di Liberia, pada 2010 ada 770 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Perang Saudara Libya yang menghancurkan menghancurkan infrastruktur kesehatan negara. Bahkan menemukan angka yang akurat tentang kematian ibu melahirkan sulit karena sebagian besar kasus tidak dilaporkan, bersama dengan masalah merekam kelahiran tradisional.

Dukungan kepada the Liberia Reconstruction and Rehabilitation Trust Fund yang didanai oleh Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk mendukung tersedianya air bersih, jalan, pengumpulan limbah, dan

lain-lain. Uni Eropa telah memberikan Dukungan Anggaran Umum kepada anggaran Liberia yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan anggaran mereka dan dapat untuk membayar guru, perawat dan dokter dan sumber daya gratis untuk investasi penting. Uni Eropa juga mendukung '*Visi Nasional: Liberia Rising 2030*' yang merupakan strategi pembangunan jangka panjang negara untuk menghasilkan status pendapatan menengah pada tahun 2030 dengan mendukung Strategi Pengurangan Kemiskinan negara. Prioritas utama adalah: perdamaian, keamanan dan supremasi hukum, infrastruktur dan transformasi ekonomi, pembangunan manusia, pemerintahan dan institusi publik.

Semua kegiatan kerja sama Uni Eropa di Liberia mempertimbangkan masalah lintas sektor: pembangunan kapasitas, pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan hak asasi manusia, pemuda, lingkungan dan perjuangan melawan HIV / AIDS. (Commission, Building partnerships for change in developing countries: Liberia, 2018) Uni Eropa juga memiliki proyek baru "*Access to justice for women and girls and reducing Female Genital Mutilation*" untuk Memperkuat kapasitas masyarakat sipil untuk mengadvokasi akses ke keadilan bagi perempuan dan anak perempuan dan mengurangi yang berjalan dari Maret 2014 - Juni 2017 bekerja sama lembaga masyarakat *ActionAid LBG*.

Pengalaman Liberia menunjukkan bahwa memiliki wanita di tingkat pemerintahan tertinggi tidak selalu mengubah kehidupan wanita biasa menjadi lebih baik. Dalam hal ini, perempuan dengan kapasitas teknis yang ada harus diidentifikasi dan dilatih secara khusus untuk mengambil peran tingkat tinggi, pengambilan keputusan. Strategi juga harus dikembangkan dan didanai untuk dukungan jangka panjang guna membangun kapasitas jaringan perempuan untuk

terlibat dalam dialog politik. (Kumalo, 2018) Di Liberia, keluarga besar akan membiayai pendidikan untuk anak laki-laki tetapi jarang anak perempuan. Alasan ketidaksetaraan pendidikan anak laki-laki terhadap anak perempuan biasanya keluarga percaya bahwa seorang wanita yang berpendidikan akan mengambil pendidikannya ke keluarga suaminya, yang mengakibatkan kerugian bagi keluarga mereka. Tanpa memandang jenis kelamin, jika keluarga mampu membayar pendidikan anak-anak, mereka biasanya diarahkan untuk pekerjaan khusus jender. Anak laki-laki diajarkan ilmu pengetahuan dan matematika sementara anak perempuan diajarkan keperawatan dan mengajar. (Sen, 2001)

Peran yang dimainkan perempuan dalam politik Liberia cukup besar. Perempuan membantu mengakhiri Perang Saudara Kedua Liberia dengan Aksi Massa untuk Gerakan Perdamaian pada tahun 2003 yang dipimpin oleh Leymah Gbowee. Partisipasi perempuan dalam politik telah meningkat menjadi 13,5% pada tahun 2011. Liberia menempati peringkat 90 dari 193 untuk perwakilan perempuan. (Cole, 2011) Uni Eropa juga bekerja sama dalam membuat program untuk melatih perempuan di Liberia tentang melek huruf, kewirausahaan dan keterampilan lain untuk meningkatkan keamanan fisik dan ekonomi mereka.

5. Nigeria

Ketidaksetaraan gender di Nigeria dipengaruhi oleh budaya dan keyakinan yang berbeda. Di sebagian besar Nigeria, wanita dianggap sebagai bawahan dari pasangan pria mereka, secara umum dipercaya bahwa wanita paling cocok sebagai penjaga rumah. (Einwechter, 2016) Uni Eropa terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan memberdayakan perempuan dan perempuan, melindungi hak-hak mereka, mengubah hidup mereka dan memperkuat suara mereka sebagai

pendorong pembangunan berkelanjutan. Proyek-proyek gender yang saat ini didanai oleh Uni Eropa di Nigeria meliputi Keterlibatan *The Promoting Women's Engagement in Peace and Security* yang bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan, memajukan kesetaraan jender dan meningkatkan perlindungan perempuan dan anak-anak dalam pengaturan konflik, memperkuat peran perempuan dalam pencegahan konflik, upaya perdamaian, dan penciptaan perdamaian; mengurangi dampak konflik terhadap perempuan dan anak perempuan; dan membangun lingkungan yang kondusif untuk implementasi yang efektif dan pemantauan komitmen *gender equality* di Nigeria. Proyek dilaksanakan oleh UN Women.

Proyek lain, *A Model for Community Monitoring of CEDAW*, bertujuan untuk berkontribusi pada promosi CEDAW di Nigeria, terutama ketentuan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan praktik diskriminatif. Proyek ini ditargetkan pada wanita muda dengan pandangan membangun kesadaran mereka pada hak asasi manusia fundamental mereka dan mempromosikan kemampuan mereka untuk mencari ganti rugi atas pelanggaran. Dukungan untuk Sektor Kesehatan di Nigeria adalah proyek yang didukung Uni Eropa yang berfokus pada perawatan *Maternal, New Born and Child Health-Care (MNCH)*, termasuk nutrisi dan ketahanan, di tiga negara bagian yaitu, Adamawa, Bauchi dan Kebbi. Proyek ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemberantasan polio secara tuntas di Nigeria. (Union, n.d)